|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **PENDAHULUAN** |

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Sesuai Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra PD) yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional. Renja PD mengarah kepada program dan kegiatan untuk pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai Implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari enam tahapan utama yaitu:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan racangan akhir Renja Perangkat Daerah
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pada tahap persiapan Inspektorat Daerah Provinsi sebelumnya telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-25-2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

* 1. **Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
20. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
21. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
22. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
24. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
25. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
    1. **Maksud dan Tujuan**
26. **Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi tahun 2019 disusun dengan maksud memberikan arahan, pedoman, dan memadukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan prestasi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2019. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan SKPD periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2019 serta menggambarkan capaian kinerja yang ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran OPD.

1. **Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2019 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh OPD.
3. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.
4. Memberikan arahan dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
   1. **Sitematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

1. **Pendahuluan**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.

1. **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

1. **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

## Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

1. **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**
2. **Penutup**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak Lanjut.

**LAMPIRAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU** |

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan untuk mencapai pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2016-2021, sebagai penunjang program/kegiatan pengawasan pada tahun 2017 melalui APBD kinerja telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) setelah Anggaran Perubahan sebesar **Rp.17.190.629.574,-** dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUMBER DANA** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** | **SISA** |
| * BELANJA TIDAK LANGSUNG | **7,570,168,512** | **7,337,031,838** | **96.92** | **233,136,674** |
| * BELANJA LANGSUNG | **9,620,461,062** | **8,468,756,457** | **88.03** | **1,151,704,605** |
| Jumlah | **17,190,629,574** | **15,805,788,295** | **91.94** | **1,384,841,279** |

Adapun Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan sebesar **Rp.15.805.788.295,-** rincian sebagai berikut **:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUMBER DANA** | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI (Rp)** | **SISA (Rp)** | **%** |
|  |  |  |  |  |
| **A.  BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **7,570,168,512** | **7,337,031,838** | **233,136,674** | **96.92** |
| -      Gaji dan Tunjangan Pegawai | 5,492,110,041 | 5,344,641,998 | 147,468,043 | 97.31 |
| -      Tambahan Penghasilan PNS | 2,078,058,471 | 1,992,389,840 | 85,668,631 | 95.88 |
| **B.  BELANJA LANGSUNG** | **9,620,461,062** | **8,468,756,457** | **1,151,704,605** | **88.03** |
| 1.   Program Pelayanan Administrasi perkantoran | 1,916,998,544 | 1,840,583,229 | 76,415,315 | 96.01 |
| a.   Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 23,152,000 | 23,132,100 | 19,900 | 99.91 |
| b.   Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik | 372,000,000 | 326,154,510 | 45,845,490 | 87.68 |
| c.   Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 | 98.00 |
| d.   Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor | 385,664,000 | 376,632,000 | 9,032,000 | 97.66 |
| e.   Penyediaan Jasa alat tulis kantor | 84,662,340 | 84,661,030 | 1,310 | 100.00 |
| f.    Penyediaan Barang cetakan Penggandaan | 64,314,545 | 64,275,480 | 39,065 | 99.94 |
| g.   Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5,665,000 | 5,615,500 | 49,500 | 99.13 |
| h.     Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 34,200,000 | 29,834,600 | 4,365,400 | 87.24 |
| i.     Penyediaan Makanan dan minuman | 42,120,000 | 41,374,500 | 745,500 | 98.23 |
| j.   Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah | 887,160,659 | 877,383,509 | 9,777,150 | 98.90 |
| k.     Penyediaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur | 17,060,000 | 10,540,000 | 6,520,000 | 61.78 |
| 2.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 213,150,000 | 212,282,259 | 867,741 | 99.59 |
| a.   Pengadaan peralatan dan perlengkapan | 2,400,000 | 2,300,000 | 100,000 | 95.83 |
| b.   Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 43,000,000 | 42,960,000 | 40,000 | 99.91 |
| c.   Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 96,000,000 | 95,674,189 | 325,811 | 99.66 |
| d.   Pemeliharaan rutin/berkala Meubuler | 5,000,000 | 4,947,000 | 53,000 | 98.94 |
| e.   Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan | 20,150,000 | 20,135,250 | 14,750 | 99.93 |
| f.    Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi | 3,900,000 | 3,795,000 | 105,000 | 97.31 |
| g.   Pemeliharaan rutin /berkala komputer dan jaringan internet | 27,700,000 | 27,649,200 | 50,800 | 99.82 |
| h.   Pengadaan peralatan studio komunikasi dan informasi | 15,000,000 | 14,821,620 | 178,380 | 98.81 |
| 3.   Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 51,840,000 | 46,940,000 | 4,900,000 | 90.55 |
| a.   Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya | 51,840,000 | 46,940,000 | 4,900,000 | 90.55 |
| 4.   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 93,820,000 | 64,940,754 | 28,879,246 | 69.22 |
| a.  Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 93,820,000 | 64,940,754 | 28,879,246 | 69.22 |
| 5.   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan | 127,698,000 | 122,806,000 | 4,892,000 | 96.17 |
| a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 15,000,000 | 10,800,000 | 4,200,000 | 72.00 |
| b. Penatausahaan Keuangan SKPD | 112,698,000 | 112,006,000 | 692,000 | 99.39 |
| 6.   Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset | 24,453,000 | 24,427,000 | 26,000 | 99.89 |
| a.     Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset | 24,453,000 | 24,427,000 | 26,000 | 99.89 |
| 7.   Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat | 200,114,400 | 118,329,200 | 81,785,200 | 59.13 |
| a.   Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat | 200,114,400 | 118,329,200 | 81,785,200 | 59.13 |
| 8.   Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum | 6,992,387,118 | 6,038,448,015 | 953,939,103 | 86.36 |
| a.   Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi | 4,594,117,118 | 3,928,550,650 | 665,566,468 | 85.51 |
| b.   Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan | 748,464,000 | 665,498,050 | 82,965,950 | 88.92 |
| c.   Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan | 446,606,000 | 409,528,970 | 37,077,030 | 91.70 |
| d.   Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan | 496,000,000 | 484,709,601 | 11,290,399 | 97.72 |
| e.   Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | 52,200,000 | 41,496,400 | 10,703,600 | 79.50 |
| f.    Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi (SPIP) | 235,000,000 | 141,978,594 | 93,021,406 | 60.42 |
| g.   Evaluasi Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 100,000,000 | 82,100,300 | 17,899,700 | 82.10 |
| h.   Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) | 100,000,000 | 86,290,500 | 13,709,500 | 86.29 |
| i.     Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi | 120,000,000 | 111,047,550 | 8,952,450 | 92.54 |
| j.     Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | 100,000,000 | 87,247,400 | 12,752,600 | 87.25 |
| **Total** | **17,190,629,574** | **15,805,788,295** | **1,384,841,279** | **91.94** |

**Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017**

Pada Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan yaitu Program “Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat” yang diaplikasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan pokok dan Program “Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum” yang diaplikasikan ke dalam 10 (sepuluh) kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 2 (dua) program dengan 11 (sebelas) kegiatan tersebut sebesar **Rp.7.192.501.518*,-***dengan rinciansebagai berikut;

* + - 1. **Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp.200.114.400,- dengan kegiatan, yaitu:**
         1. Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp.200.114.400,-
      2. **Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp.6.992.387.118,- dengan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu:**
         1. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Rp.4.594.117.118,-
         2. Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp.748.484.000,-
         3. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan Rp.446.606.000,-
         4. Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan Rp.496.000.000,-
         5. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Rp.52.200.000,-
         6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Rp.235.000.000,-
         7. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Rp.100.000.000,-
         8. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) Rp.100.000.000,-
         9. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Rp.120.000.000,-
         10. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Rp.100.000.000

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Mengimplementasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

dengan kegiatan:

* + - 1. Peningkatan Koordinasi Pananganan Pengaduan Masyarakat

Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan dukungan dana sebesar Rp.200.114.400,- dengan realisasi Rp.118.329.200 (59,13%).

Adapun pemeriksaan kasus/khusus pengaduan masyarakat meliputi pemeriksaan kasus/khusus berupa pelanggaran terhadap PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2006. Hasil pemeriksaan kasus/khusus/pengaduan masyarakat pada tahun 2017 terlihat pada tabel berikut:

**Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat**

**Tahun 2017**

**Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS PENGADUAN MASYARAKAT** | **JUMLAH** |
| **1.** | Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990), terdiri dari: | 5 kasus |
| **2.** | Kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No.30/1980 / PP 53 tahun 2010 / PP No. 32 tahun 1979 / Pergub No. 30 Tahun 2006) | 6 kasus |
| **3.** | Pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat | 5 kasus |
| **4.** | Pemeriksaan khusus atas Instruksi/Permintaan Pejabat Berwenang | 11 kasus |
| **5.** | Pemeriksaan khusus lanjutan dari Pemeriksaan Reguler | 1 kasus |
|  | Jumlah | 28 kasus |

Dari pemeriksaan kasus diatas dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS PENGADUAN MASYARAKAT** | **JUMLAH** |
| **1.** | Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990) |  |
|  | Izin perceraian : |  |
|  | Disetujui | 3 orang |
|  | Ditolak | 2 orang |
|  | Damai | - orang |
| **2.** | Rekomendasi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010,PP 32/1979, PP 10/1983 yo PP 45/1990 sebagai berikut: |  |
|  | Hukuman Disiplin Berat | 5 orang |
|  | Hukuman Disiplin Sedang | 6 orang |
|  | Hukuman Disiplin Ringan | 7 orang |

1. **Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum**

dengan 10 (sepuluh) kegiatan :

* + - 1. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi
         1. Pemeriksaan Kinerja:

Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pedoman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum dan urusan pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan asset/ barang daerah.

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah direncanakan 63 objek Pemeriksaan (OP) yang terdiri dari 53 OP Provinsi dan 10 OP SMA/SMK di Kabupaten/Kota. Dari 63 OP telah selesai diperiksa seluruhnya dengan tingkat capaian 100%.

Terhadap 63 OP dalam PKPT tahun 2017, ditargetkan penerbitan LHP sebanyak 103 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan realisasi penerbitan LHP sebanyak 106 buah laporan dengan capaian sebesar 102,91%. Secara kuantitatif dari hasil pemeriksaan reguler yang telah dilakukan selama Tahun 2017 dijumpai sebanyak 1.256 temuan dengan 2.872 saran dan nilai kerugian negara/daerah serta kewajiban penyetoran kepada Negara/Daerah senilai Rp.738.818.334,-.

* + - * 1. Reviu :

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 telah direncanakan Reviu sebanyak 7 (tujuh) macam yaitu :

1. Reviu Laporan Keuangan SKPD tahun 2016
2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016
3. Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016
4. Reviu Lakip Provinsi
5. Reviu RKPD
6. Reviu KUA PPAS
7. Reviu RKA

Adapun realisasi Reviu telah terlaksana seluruhnya dengan capaian 100%.

* + - * 1. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) :

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga merencanakan pelaksanaan Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terhadap OPD Provinsi Sumatera Barat (36 SKPD). Kegiatan ini dilakukan untuk menilai kinerja dan pertanggung jawaban OPD terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Dari target 36 SKPD yang sudah ditetapkan telah terlaksana Evaluasi LKjIP sebanyak 38 SKPD Provinsi dengan tingkat capaian kinerja kegiatan 105,56%.

* + - 1. Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana temuan-temuan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti/diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas dalam kurun waktu tertentu. Secara kuantitatif dari hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah Provinsi selama tahun 2017 dijumpai sebanyak 1.256 temuan dengan 2.872 saran dan berupa temuan kerugian negara/daerah serta kewajiban penyetoran kepada negara/daerah senilai Rp.738.818.344,-. Berdasarkan temuan tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.077 saran (72,32%) dengan nilai Rp.426.832.750,- sedangkan sisanya sebanyak 795 saran (27,68%) dengan nilai Rp.311.985.594,- masih dalam penanganan tidak lanjut, karena ada sebagian objek pemeriksaan belum punya cukup waktu untuk menindak lanjuti disebabkan laporan hasil pemeriksaannya diterima pada akhir tahun.

Tahun 2017 telah diprogramkan kegiatan untuk penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik monitoring dan pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi maupun Pemantauan TLHP Itjen Kementerian serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Upaya menagih dan mendorong objek yang diperiksa dan pihak berwenang dalam menyelesaikan TLHP terus dilakukan dan dimaksimalkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar, tidak saja atas hasil pemeriksaan sendiri lainnya tetapi juga atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan lainnya termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Itjen Kementerian dan Unit Pengawas lainnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017 adalah;

* + 1. Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
    2. Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut
    3. Rapat Pemutakhiran Data
    4. Rapat Pra Pembahasan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan

Frekuensi kegiatan tersebut selama tahun 2017 untuk tiap aparat pengawasan dapat dilihat sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **Jumlah** |
| 1. | Monitoring/pemantauan TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi, BPK, Itjen Kepmendagri, dan Itjen Teknis Lainnya | 24 kali |
| 2. | Rapat Pra Pemutakhiran Data Itjen Kemendagri | 1 Kali |
| 3. | Rapat Pemutakhiran Data Itjen Kemendagri | 1 kali |

* + - 1. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan kuantitas sumber daya pengawas yang profesional, yang akan diwujudkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa.

Selama tahun 2017, kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia telah dilakukan melalui berbagai macam diklat dan sebagainya antara lain:

|  |  |
| --- | --- |
| **JENIS DIKLAT** | **JUMLAH** |
| 1. Diklat Fungsional | **1** |
| * 1. Diklat Fungsional Analisa Jabatan dan Beban Kerja | 1 |
|  |  |
| 1. Diklat Teknis | **40** |
| 1. Diklat Teknis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) | 1 |
| 1. Diklat Penilaian Angka Kredit JFA | 2 |
| 1. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa | 2 |
| 1. Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 | 1 |
| 1. Diklat Penilaian Maturitas SPIP Pegawai di Lingkungan APIP | 3 |
| 1. Diklat Teknis Pengarusutamaan Gender bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 | 1 |
| 1. Diklat Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat | 30 |
|  |  |
| 1. Diklat/Penataran Lainnya | **104** |
| 1. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 |
| 1. Bimtek Anjab | 1 |
| 1. Sosialisasi Penilaian Angka Kredit JFA | 1 |
| 1. Sosialisasi Laik Fungsi Jalan | 21 |
| 1. Bimtek Peningkatan Pemahaman Timda terhadap Instrumen Evaluasi Kab/Kota Regional III | 1 |
| 1. Bimtek dan Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 | 23 |
| 1. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemda Regional I | 1 |
| 1. Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah | 2 |
| 1. Sosialiasi Permenpan No 34 Tahun 2017 | 1 |
| 1. Bimtek Pengembangan Kapasitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 | 10 |
| 1. Bimtek Penggunaan *Cash Management System* (CMS) Bank Nagari | 4 |
| 1. Pelatihan SIPKD Modul Penganggaran di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 2 |
| 1. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 1 |
| 1. PKS “Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparat Pengawasan bagi Auditor dan P2UPD di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat | 20 |
| 1. Pelatihan Implementasi Perfomance Audit/Audit Kinerja | 2 |
| 1. Pelatihan Teknis Reformasi Birokrasi bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 1 |
| **Total** | **145** |
|  |  |
|  |  |

* + - 1. Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun hasil kegiatan Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan sebagai berikut :

* + 1. Mengadakan rapat-rapat penyusunan dan penyusunan hasil kegiatan yang dilaksanakan antara lain;

1. Penyusunan UPKPT yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan hasil 1 (satu) buah PKPT.
2. Penyusunan anggaran baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung berupa Renja, RKA, DPA dan DPPA Tahun 2017.
3. Penyusunan dan Penyampaian Internal Control Questioner yang dilaksanakan sebanyak 63 SKPD.
4. Menyusun dan membuat Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, LKjIP 2017.
5. Penyusunan Pengukuran Capaian Kinerja Semerter I dan II Tahun 2017.
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2017.
7. Penyusunan Laporan Triwulan PKPT Tahun 2017.
8. Penyusunan Laporan Evaluasi PKPT Tahun 2017.
   * 1. Mengikuti rapat-rapat ke tingkat pusat antara lain;
9. Mengikuti Pra Rakorwasdanas dan Rakorwasnas yang dilaksanakan oleh Itjen Kemendagri sebanyak 2 (dua) kali.
10. Mengikuti rapat-rapat di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali.
    * + 1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP Nomor 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya EPPD adalah :

1. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.
2. Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.
3. Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota di tingkat provinsi dan nasional.
4. Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Sebagai bahan masukan untuk Kementerian untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pada Tahun 2017 telah dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap 19 Kabupaten/kota.

* + - 1. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu hal mutlak yang perlu dibangun dan dilaksanakan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan Penyelenggaraan SPIP agar setiap Instansi Pemerintahan dapat memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Workshop SPIP kepada 10 SKPD yang akan dijadikan sebagai sample dalam penilai maturitas SPIP Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dari tanggal 5 s.d 6 September 2017 di Hotel Rangkayo Basa.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Impelentasi SPIP Tahun 2017 adalah:

1. OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membangun sistem dan infrastruktur untuk mengimplementasikan SPIP.
2. Terumuskannya strategi dan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait implementasi penyusunan profil risiko dan rencana tindak pengendalian.
3. Salah satu bentuk upaya memotivasi OPD untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009.
   * + 1. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan terhadap 5 (lima) OPD yaitu :

1. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
2. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Komunikasi an Informatika Provinsi Sumatera Barat
4. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah **77.65** atau kategori **“BB”.** Indeks Reformasi Birokrasi ini merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Komponen Penilaian** | **Nilai Maks** | **Nilai 2017** | **% Capaian** |
| **1.** | **Komponen Pengungkit** |  |  |  |
|  | * 1. Manajemen Perubahan | 5,00 | 4,4 | 87,93 |
|  | * 1. Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 5,00 | 3,13 | 62,5 |
|  | * 1. Penataan dan Penguatan Organisasi | 6,00 | 5,17 | 86,11 |
|  | * 1. Penataan Tatalaksana | 5,00 | 4,38 | 87,63 |
|  | * 1. Penataan Sistem Manajemen SDM | 15,00 | 14,86 | 99,05 |
|  | * 1. Penguatan Akuntabilitas | 6,00 | 5,8 | 96,67 |
|  | * 1. Penguatan Pengawasan | 12,00 | 11,4 | 95,02 |
|  | * 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,00 | 5,06 | 84,32 |
|  | **Total Komponen Pengungkit** | **60,00** | **54,19** | **90,31** |
| **2.** | **Komponen Hasil** |  |  |  |
|  | * + - 1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20,00 | 10,04 | 50,02 |
|  | * + - 1. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN | 10,00 | 6,5 | 65,00 |
|  | * + - 1. Kualitas Pelayanan Publik | 40,00 | 6,93 | 69,25 |
|  | **Total Komponen Hasil** | **40,00** | **23,,47** | **78,22** |
|  | **Indeks RB** | **100** | **77,65** | |

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa entrian data secara elektronik telah dikirim ke Menpan melalui website ***pmprb.menpan.go.id*** secara online.

* + - 1. Pembinaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)

Kegiatan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Pada tahun 2017 telah dilakukan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) terhadap 2 (dua) SKPD yaitu RSUD Solok dan RSUD Pariaman.

* + - 1. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap ProgramPengendalian Gratifikasi

Kegiatan Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas dalam menjalankan pelayanan masyarakat.

Agar implementasi pengendalian gratifikasi tetap berjalan dan diterapkan pada setiap SKPD pada tahun 2017, telah dilakukan launching pemakaian pin “Ayo! Tolak Gratifikasi” dan sosialisasi pengendalian gratifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Axana dengan menghadirkan Direktur Gratifikasi KPK sebagai narasumber dan diikuti oleh Tim Pengendalian Gratifikasi masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, jumlah peserta dari kegiatan tersebut sebanyak 200 orang.

Selanjutnya, pada tahun 2018 akan dilaksanakan kembali sosialisasi pengendalian gratifikasi guna penguatan pemahaman gratifikasi dan upaya pengendalian gratifikasi oleh Tim Pengendalian Gratifikasi masing-masiing SKPD.

* + - 1. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan. LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Adapun maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah agar pelaporan harta kekayaan dapat segera dilaporkan oleh seluruh pejabat wajib lapor LHKPN di setiap SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2017 data LHKPN yang telah masuk yaitu 461 wajib lapor, data LHKASN yang telah masuk yaitu 767 wajib lapor. Dari target 1.000 wajib lapor, telah terealisasi 1.228 wajib lapor dengan capaian 122,8%. Untuk pengentrian data ke sistem dilaksanakan tahun 2018 sesuai dengan SE KPK Nomor SE-08/01.10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

**Perkiraan Capaian Tahun Anggaran 2018**

Pada tahun 2018 usulan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi sebesar Rp.10.104.050.000,- terurai dalam 7 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Adapun program dan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | | | **PAGU** |
|
| **1** | **2** | | | **3** |
|  | **I.** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **1,843,578,600** |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 23,152,000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 334,800,000 |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2,400,000 |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 69,358,600 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 64,383,000 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,650,000 |
| 7 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1,000,000 |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 34,200,000 |
| 9 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah | 833,375,000 |
| 10 | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur | 18,100,000 |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 56,160,000 |
| 12 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 103,930,114 |
| 13 | Penyediaan Jasa Sopir Kantor | 71,496,970 |
| 14 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 225,572,916 |
|  | | | | |
|  | **II.** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | **342,144,000** |
| 1 | Pengadaan Meubeleur | 46,200,000 |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi | 3,900,000 |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 7,000,000 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 96,000,000 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9,150,000 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 27,700,000 |
| 7 | Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD | 52,194,000 |
| 8 | Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan | 100,000,000 |
|  | | | | |
|  | **III.** | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | **74,649,600** |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 74,649,600 |
|  | | | | |
|  | **IV.** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | | **93,820,000** |
| 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 93,820,000 |
|  | | | | |
|  | **V.** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | | **167,298,000** |
| 1 | Penatausahaan Keuangan OPD | 121,698,000 |
| 2 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 45,600,000 |
|  | | | | |
|  | **VI.** | **PROGRAM IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT** | | **140,994,400** |
| 1 | Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat | 140,994,400 |
|  | | | | |
|  | **VII.** | **PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM** | | **7,441,565,400** |
| 1 | Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi | 4,430,490,400 |
| 2 | Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 692,130,000 |
| 3 | Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan | 661,973,000 |
| 4 | Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan | 496,000,000 |
| 5 | Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | 112,200,000 |
| 6 | Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi | 195,980,000 |
| 7 | Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 92,628,000 |
| 8 | Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi | 120,000,000 |
| 9 | Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | 100,000,000 |
| 10 | Pembinaan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | 100,000,000 |
| 11 | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar | 440,164,000 |
| **JUMLAH** | | | | **10,104,050,000** |

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABEL T-C.29** | | | | | | | | | | |
| **REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN** | | | | | | | | | | |
| **PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2017** | | | | | | | | | | |
| **PROVINSI SUMATERA BARAT** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1 (2018) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
| Target Renja PD Tahun 2017 | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat** | **Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat | Prosentase kasus yang ditangani dan diselesaikan | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 60.00 |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |
|  | **Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** | **Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur, penegak hukum dalam pemberantasan korupsi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan pemeriksaan Reviu dan Evaluasi | Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dan jumlah obrik yang diperiksa | 318 | 66 | 63 | 63 | 100 | 63 | 192 | 60.38 |
|  | Peningkatan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan | Jumlah LHP yang ditindaklanjuti | 339 | 70 | 63 | 63 | 100 | 70 | 203 | 59.88 |
|  | Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan | Terkirimnya peserta untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, dan diklat teknis lainnya | 440 | 65 | 72 | 72 | 100 | 112 | 249 | 56.59 |
| Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi pengawasan dalam dan luar provinsi | 100 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 60 | 60.00 |
|  | Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | Terselenggaranya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 95 | 19 | 19 | 19 | 100 | 19 | 57 | 60.00 |
|  | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Terselenggaranya Penilaian Resiko serta penyusunan SOP secara bertahap Pemprov Sumbar | 320 | 60 | 60 | 60 | 100 | 70 | 190 | 59.38 |
| Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) | Terselenggaranya evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi | 25 | 5 | 5 | 5 | 100 | 62 | 72 | 288.00 |
|  | Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | Terselenggaranya Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 60.00 |
|  | Penyusunan Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah | Tersusunnya Perda tata cara penuntutan ganti kerugian daerah | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 100.00 |
| Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi | Terselenggaranya sosialisasi dan pengendalian gratifikasi | 264 | 70 | 47 | 47 | 100 | 50 | 167 | 63.26 |
| Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Terselenggaranya laporan harta kekayaan | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 1,000 | 3,000 | 60.00 |
|  | Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Provinsi Sumatera Barat | Terlaksananya penyusunan, pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD PPK) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 33.33 |
|  | Operasionalisasi Saber Pungli | Terlaksananya pengawasan terhadap pungli | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 33.33 |
|  | Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Kejaksaan | Terwujudnya koordinasi TP4D dengan Kejaksaan | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 33.33 |

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2017**

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Disamping itu melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah pegawai sebanyak 86 orang. Dimana pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk eselon II, III dan IV sebanyak 9 orang dan sudah terisi semua kebutuhan jabatan struktural sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk jabatan fungsional pada tahun 2017 baru sebanyak 20 orang Auditor dan 11 orang P2UPD. Tenaga aparat pengawas non auditor melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 4 orang. Sedangkan staf sebanyak 42 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

**Keadaan Pegawai Menurut Jabatan tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan/eselon** | **Jml** | **Golongan** | | | | **Ket** |
| I | II | III | IV |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Struktural :  - Eselon I  - Eselon II  - Eselon III  - Eselon IV  Fungsional Auditor  - Ahli madya  - Ahli muda  - Pertama  - Penyelia  - Pelaksana lanjut  P2UPD  - Pengawas Pem. Madya  - Pengawas Pem. Muda  - Pengawas Pem. Pertama  Fungsional Auditor Kepeg.  Non JFA/P2UPD  Staf(Fungsional Umum)  PTT | **9**  -  1  5  3  **20**  7  7  4  2  0  **11**  3  8  -  **-**  **4**  **42**  **-** | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  15  - | -  -  -  -  1  -  -  7  4  2  -  -  3  8  -  -  3  26  - | -  1  5  2  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  - |  |
| Jumlah | | **86** | - | **16** | **54** | **16** |  |

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

Selain jumlah pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Daftar Rekapitulasi Barang dan Inventaris

Tahun 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA BARANG** | **JUMLAH** | **JUMLAH HARGA** | **KONDISI** | | |
| **JENIS BARANG** | **BARANG** | **(Rp)** | **Baik** | **Kurang baik** | **Rusak Berat** |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor | 1 lks | 1,097,970,000 | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERALATAN DAN MESIN |  |  |  |  |  |
| 1 | Roda Empat/Mobil | 9 unit | 1.869.637.000,- | 8 | 1 | - |
| 2 | Sepeda Motor | 1 unit | 17.065.500,- | 1 | - | - |
| 3 | Alat ukur | 2 unit | 3.883.000,- | 2 | - | - |
| 4 | Rak siku lobang | 4 unit | 23.760.000,- | 4 | - | - |
| 5 | Filing Kabinet | 8 unit | 18.539.000,- | 5 | 3 | - |
| 6 | Brand Kas | 2 unit | 320.000,- | - | 2 | - |
| 7 | White board | 3 unit | 2.841.000,- | 3 | - | - |
| 8 | Penghancur kertas | 4 unit | 12.100.000,- | 4 | - | - |
| 9 | Finger print | 2 unit | 7.150.000,- | 1 | - | - |
| 10 | Lemari arsip | 15 unit | 68.290.000,- | 9 | 4 | 2 |
| 11 | Lemari arsip eselon 3 | 4 unit | 39.580.000,- | 1 | - | - |
| 12 | Lemari arsip eselon 2 | 1 unit | 14.245.000,- | 1 | - | - |
| 13 | Meja Rapat | 18 unit | 44.747.500,- | 18 | - | - |
| 14 | Kursi rapat / putar | 94 unit | 73.346.000,- | 62 | 12 | 20 |
| 15 | Kursi putar siding | 16 unit | 11.000.000,- | 16 | - | - |
| 16 | Kursi kerja staf | 32 unit | 36.960.000,- | 32 | - | - |
| 17 | Kursi rapat aula | 100 unit | 37.400.000,- | 100 | - | - |
| 18 | Meja kerja | 55 unit | 9.625.000,- | 28 | - | 27 |
| 19 | Meja kerja staf | 57 unit | 112.860.000,- | 57 | - | - |
| 20 | Pentas mini | 1 unit | 1.650.000,- | - | - | 1 |
| 21 | Meja televise | 1 unit | 1.500.000,- | 1 | - | - |
| 22 | Lemari es | 1 unit | 4.972.000,- | 7 | - | - |
| 23 | AC Split | 21 unit | 169.907.600,- | 15 | 2 | 4 |
| 24 | Kipas angina | 3 unit | 1.356.000,- | 1 | 2 | - |
| 25 | Televisi | 1 unit | 6.380.000,- | 1 | - | - |
| 26 | Speaker | 2 unit | 9.845.000,- | - | 1 | - |
| 27 | Speaker colom (merk toa) | 1 unit | 1.419.000,- | 1 | - | - |
| 28 | Wireles | 1 unit | 8.937.500,- | - | 1 | - |
| 29 | Power Amplifie | 1 unit | 4.455.000,- | - | 1 | - |
| 30 | Mixer | 1 unit | 6.765.000,- | - | 1 | - |
| 31 | Toa Amplifier | 1 unit | 1.430.000,- | - | 1 | - |
| 32 | Creas chairmen | 1 unit | 1.391.500,- | - | 1 | - |
| 33 | Creas power | 1 unit | 2.062.500 | - | 1 | - |
| 34 | Sound sistem | 1 unit | 10.560.000,- | - | 1 | - |
| 35 | Crosover Digital | 1 unit | 7.950.000,- | 1 | - | - |
| 36 | Generator set | 1 unit | 59.730.000,- | 1 | - | - |
| 37 | UPS/Stabilizer | 1 unit | 2.970.000,- | - | 1 | - |
| 38 | Lbg. Burung Garuda | 1 unit | 650.000,- | 1 | - | - |
| 39 | Gambar Presiden | 1 unit | 500.000,- | 1 | - | - |
| 40 | Gambar Wk Presiden | 1 unit | 500.000,- | 1 | - | - |
| 41 | Meja Fodium | 1 unit | 215.000,- | 1 | - | - |
| 42 | Alat Pemadam | 1 unit | 888.000,- | 3 | - | - |
| 43 | Personal Computer | 13 unit | 132.397.500,- | 8 | 2 | 3 |
| 44 | Program aplikasi gaji | 1 unit | 4.950.000,- | - | - | 1 |
| 45 | Jaringan SIPKD | 1 paket | 7.012.500,- | 1 | - | - |
| 46 | Note Book | 25 unit | 271.573.500,- | 21 | 2 | 2 |
| 47 | Printer | 26 unit | 66.322.000,- | 15 | 3 | 8 |
| 48 | Meja kerja esselon III | 1 unit | 7.800.000,- | 1 | - | - |
| 49 | Meja kerja pejabat esselon III/IV | 4 unit | 19.800.000,- | 4 | - | - |
| 50 | Kursi tamu | 7 unit | 23.677.500,- | 4 | - | 3 |
| 51 | Kursi kerja pejabat esselon II | 1 unit | 4.925.000,- | 1 | - | - |
| 52 | Kursi kerja pejabat esselon III/IV | 7 unit | 19.321.500,- | 7 | - | - |
| 53 | Kursi tamu pejabat esselon II | 1 unit | 22.550.000,- | 1 | - | - |
| 54 | Kursi tamu pejabat esselon III/IV | 2 unit | 19.800.000,- | 2 | - | - |
| 55 | Lemari Pustaka/Rak | 1 unit | 1.980.000,- | - | 1 | - |
| 56 | CCTV | 1 paket | 57.200.000,- | 1 | - | - |
| 57 | CCTV (camera CCTV) | 1 unit | 11.000.000,- | 1 | - |  |
| 58 | Proyektor | 1 unit | 39.736.620,- | 2 | - | 1 |
| 59 | Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext | 1 unit | 42.900.000,- | 1 | - | - |
| 60 | Faximile | 1 unit | 9.350.000,- | 1 | - | - |
| 61 | Mesin hitung uang | 1 unit | 4.400.000,- | 1 | - | - |
| 62 | Mesin foto copy | 1 unit | 119.075.000,- | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | GEDUNG DAN BANGUNAN |  |  |  |  |  |
| 62 | Bangunan Kantor | 1 lokasi | 3.117.638.658,- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASET TETAP LAINNYA |  |  |  |  |  |
|  | Buku Peraturan dan Umum |  | 39.965.774,- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 5 (lima) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 5 (lima) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Pada Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Pelayanan SKPD dari 5 (lima) sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABEL T-C.30** | | | | | | | | | | | | |
| **Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah** | | | | | | | | | | | | |
| **Provinsi Sumatera Barat** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Indi-kator** | **SPM/Stan-dar Nasional** | **IKU** | **Target Renstra Perangkat Daerah** | | | | **Realisasi Capaian** | | **Proyeksi** | | **Catatan Analisa** |
| **Tahun 2017 (n-2)** | **Tahun 2018 (n-1)** | **Tahun 2019 (n)** | **Tahun 2020 (n+1)** | **Tahun 2017 (n-2)** | **Tahun 2018 (n-1)** | **Tahun 2019 (n)** | **Tahun 2020 (n+1)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  | Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material | 88% | 90% | 94% | 96% | 113,64% |  | 100% | 100% |  |
| 2 |  |  | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset | 88% | 90% | 94% | 96% | 95,45% |  | 100% | 100% |  |
| 3 |  |  | Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti | 70% | 70% | 70% | 70% | 103,31% |  | 100% | 100% |  |
| 4 |  |  | Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani dalam waktu sesuai standar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  |
| 5 |  |  | Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas | 36 | 37 | 37 | 38 | 105,56% |  | 100% | 100% |  |
| 6 |  |  | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | 162,5% |  | 100% | 100% |  |
| 7 |  |  | OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM | 4 OPD | 6 OPD | 6 OPD | 6 OPD | 100% |  | 100% | 100% |  |
| 8 |  |  | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | 150% |  | 100% | 100% |  |
| 9 |  |  | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB | BB | BB | BB |  |  | 100% | 100% |  |
| 10 |  |  | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 95% | 95% | 95% | 95% | 101,02% |  | 100% | 100% |  |

Dari tabel diatas terlihat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 tercapai sangat baik yaitu diatas 100%, kecuali indikator kedua dengan capaian 95,45%. Namun demikian sasaran yang kita harapkan dengan capaian kinerja sangat baik, menjadikan tujuan yang kita capai akan terwujud sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis kinerja pelayanan SKPD terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran Tahun 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sasaran 1** | Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan |

**Sasaran 1** yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan” dengan indikator kinerja yaitu:

* + - 1. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 88%.
      2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dengan target 88%.
      3. Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti dengan target 70%.
      4. Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar dengan target 100%.
      5. Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas dengan target 36 OPD.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 terlihat pada tabel dibawah ini:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1**

**Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar**

**Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **%CAPAIAN** |
| 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan | 1. Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material 2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset 3. Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti 4. Pesentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani dalam waktu sesuai standar 5. Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas | 88%  88%  70%  100%  36 OPD | 100%  84%  72,32%  100%  38 OPD | 113,64  95,45  103,31  100  105,56 |

Berdasarkan tabel diatas, analisa capaian indikator kinerja **sasaran 1** ini yaitu:

* + - 1. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 88%.

**Perbandingan antara target dengan realisasi**

SKPD dikatakan bebas dari penyimpangan material apabila penyimpangan nilai keuangan yang terjadi kurang dari atau sama dengan 10% dari total anggaran SKPD. Dari pemeriksaan tahun 2017 penyimpangan material tidak ada yang melebihi 10% dari total anggaran masing-masing SKPD, sehingga dapat dikatakan bahwa SKPD yang bebas dari penyimpangan material adalah 50 SKPD (100%).

Indikator kinerja Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 88% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,64% termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja SKPD yang bebas dari penyimpangan material diukur dengan membandingkan jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2017 dengan jumlah seluruh SKPD tahun 2017. Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| * Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material | = Jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2017 x 100%  Jumlah seluruh SKPD tahun 2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = 50 SKPD x 100%  50 SKPD tahun 2017 |  |
|  | = 100% |  |
| * Capaian KInerja | = 100 x 100%  88 |  |
|  | = 113.64% |  |

Sehingga realisasi persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material adalah 100% dari target 88% dengan capaian kinerja 113.64%.

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 1 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Indikator Kinerja** | 1. **2016** | 1. **2017** |
| 1. Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material | 118 | 113,64 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 113.64% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2016) indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terjadi karena target yang ditetapkan semakin tinggi. Namun demikian realisasi target tetap 100% (sangat baik).

**Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam rangka menekan kerugian daerah adalah:

* + - 1. Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat.
      2. Reviu Laporan Keuangan SKPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memilki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan.
      3. Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi .

1. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dengan target 88%.
   * + - 1. **Perbandingan antara target dengan realisasi**

Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dihitung dari perbandingan jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2017 dengan jumlah seluruh SKPD tahun 2017.

Dasar perhitungan Realisasi :

|  |  |
| --- | --- |
| * Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset | = Jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2017 x 100%  Jumlah seluruh SKPD tahun 2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = 42 SKPD x 100%  50 SKPD tahun 2017 | = 84% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capaian KInerja | = 84 x 100%  88 | = 95,45% |

Capaian Kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset adalah 95.45%.

* + - * 1. **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 1 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Indikator Kinerja** | 1. **2016** | 1. **2017** |
| 1. 2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset | 101 | 95,45 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 95,45% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator kinerja mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan.

* + - * 1. **Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Terhadap keberhasilan capaian kinerja telah dilakukan langkah-sebagai berikut :

1. Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat
2. Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Memberikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, rekonsiliasi barang milik daerah.
4. Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat di tindak lanjuti dengan target 70%.
5. **Perbandingan antara target dengan realisasi**

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang di harapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana temuan-temuan hasil pengawasan dapat ditindak lanjuti/diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas dalam kurun waktu tertentu.

Dasar penetapan pengukuran:

**Rekomendasi Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sumbar**

**Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Tahun 2017 |
| 1 | Jumlah rekomendasi atas temuan | 2.872 |
| 2 | Jumlah rekomendasi atas temuan yang ditindaklanjuti | 2.077 |
| Persentase (%) | | 72.32 |

Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklajuti dengan target tahun 2017 sebesar 70%. Pada pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi 2017 terdapat rekomendasi (saran) atas temuan sebanyak 2.872 saran dan dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.077 saran dengan realisasi capaian 72,32% dan capaian kinerja 103,31%.

Dasar perhitungan :

1. **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Terhadap indikator persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 1 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Indikator Kinerja** | 1. **2016** | 1. **2017** |
| 1. 3. Persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti | 112 | 103,31 |

Dari tahun 2016 indikator kinerja persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti berada diatas 90% (sangat baik). Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan dari tahun 2016 tetapi tidak terlalu signifikan hal ini disebabkan karena masih rendahnya respon auditan dalam menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan beberapa temuan pada pemeriksaan akhir tahun yang belum ditindaklanjuti.

1. **Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun faktor pendorong dan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain :

1. Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar.
2. Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan yang telah diterima Gubernur serta membuat *action plan* guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.
3. Pembahasan dengan SKPD terkait untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
4. Menyampaikan bukti TLHP secara periodik/berkala.
5. Menyiapkan bukti-bukti dan penjelasan atas temuan yang sulit ditindaklanjuti.
6. Pemantauan TLHP oleh BPK RI di Perwakilan BPK RI.
7. Evaluasi akhir tahun atas perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
8. Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar dengan target 100%.

**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Pengaduan Masyarakat merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penanganan pengaduan masyarakat meliputi : penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai.

Selama tahun 2017 Inspektorat Provinsi telah melaksanakan pemeriksaan kasus/khusus sebagai berikut:

1. Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No.45/1990) sebanyak 5 kasus
2. Kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No.30/1980 / PP 53 tahun 2010 / PP No. 32 tahun 1979 / Pergub No. 30 Tahun 2006) sebanyak 6 kasus.
3. Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat sebanyak 5 kasus
4. Pemeriksaan khusus atas instruksi/permintaan pejabat berwenang 11 kasus dan kasus diangkat dari pemeriksaan Reguler 1 kasus.

Selama tahun 2017, jumlah kasus/khusus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 28 kasus dan dapat ditangani/diselesaikan semuanya sebanyak 28 kasus (100%).

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 1 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **REALISASI** | | **% CAPAIAN** | |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| 4. Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar | 100  (34 kasus) | 100  (28 kasus) | 100  (34 kasus) | 100  (28 kasus) |

Berdasarkan analisis data terhadap sasaran strategis, pada tahun 2016 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 34 kasus dan dapat ditindaklanjuti semuanya dengan capaian 100%. Pada tahun 2017 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 28 kasus dan sudah dapat diselesaikan/ditindaklanjuti semuanya sebanyak 28 kasus dengan capaian kinerja 100%. Selama *trend* kinerja terhadap sasaran ini dari tahun

2016 sampai 2017 dengan rata-rata capaian kinerja 100% (sangat baik).

**Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk penyelesaian pengaduan masyarakat ini yaitu dengan :

Setiap kasus yang masuk sesegera mungkin diproses, dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perintah/arahan Gubernur.

Penetapan waktu penyelesaian pemeriksaan kasus yang tidak terlalu lama.

Memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

1. Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas dengan target 36 OPD.

**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Target indikator yang digunakan adalah Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas dengan target 36 OPD. Pada tahun 2017 telah dilakukan evaluasi terhadap SAKIP SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan hasil 38 SKPD dengan nilai B keatas dengan capaian kinerja 105,56%.

Adapun hasil penilaian evaluasi LAKIP tahun 2016-2017 terlihat pada tabel berikut:

**HASIL PENILAIAN EVALUASI LAKIP TAHUN 2016 - 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SKPD** | **KATEGORI** | |
| **Penilaian**  **2017**  **(LAKIP 2016)** | **Penilaian**  **2016**  **(LAKIP 2015)** |
| 1 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BB | BB |
| 2 | DINAS KEHUTANAN | BB | BB |
| 3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | BB | BB |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BB | BB |
| 5 | RSUD ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI | BB | BB |
| 6 | RS JIWA PROF. HB SA'ANIN PADANG | BB | B |
| 7 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BB | BB |
| 8 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BB | B |
| 9 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN | BB | BB |
| 10 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | BB | B |
| 11 | BIRO ORGANISASI | B | B |
| 12 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | B | B |
| 13 | BIRO UMUM | B | CC |
| 14 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | B | B |
| 15 | RSUD PARIAMAN | B | B |
| 16 | BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN | B | B |
| 17 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | B | B |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | B | B |
| 19 | DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN | B | B |
| 20 | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | B | B |
| 21 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | B | B |
| 22 | DINAS SOSIAL | B | B |
| 23 | BADAN KETAHANAN PANGAN | B | B |
| 24 | RSUD SOLOK | B | B |
| 25 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB | B | B |
| 26 | DINAS KESEHATAN | B | B |
| 27 | DINAS KOPERASI DAN UMKM | B | B |
| 28 | BKPM DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU | B | B |
| 29 | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | B | B |
| 30 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | B | B |
| 31 | BIRO PEREKONOMIAN | B | B |
| 32 | BAKORLUH | B | B |
| 33 | SATPOL PP | B | B |
| 34 | SEKRETARIAT DPRD | B | CC |
| 35 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | B | B |
| 36 | BADAN KESBANGPOL | B | B |
| 37 | BIRO PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN | B | B |
| 38 | BIRO BINA SOSIAL | B | B |
| 39 | BIRO HUKUM | CC | B |
| 40 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOLER | CC | CC |
| 41 | SEKRETARIAT KPID | CC | C |
| 42 | BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | CC | B |
| 43 | SEKRETARIAT KORPRI | CC | CC |
| 44 | BIRO PENGELOLAAN ASET | C | CC |
| 45 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | C | CC |
| 46 | INSPEKTORAT | - | BB |
| 47 | DINAS PERKEBUNAN | - | B |
| 48 | BIRO ADM PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA RANTAU | - | B |
| 49 | KANTOR PENGHUBUNG | - | CC |

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 1 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **REALISASI** | | **% CAPAIAN** | |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| 5. Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas | 41 | 38 | 117,14 | 105,56 |

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja mengalami penurunan yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa SKPD dengan nilai baik yang tidak diperiksa

**Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk perbaikan sistim AKIP di pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masing-masing SKPD provinsi dan beberapa sampel kabupaten/kota.
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi
3. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya
4. Membuka peluang konsultasi bagi SKPD dan Kabupaten/kota untuk perbaikan sistem akuntabilitas kinerjanya (SAKIP)

**Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1**

Pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan **Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat** dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dukungan dana sebesar Rp.200.114.400,- dengan realisasi Rp.118.329.200,- (59,13%) dan **Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp.4.594.117.115,- dan realisasi sebesar Rp.3.928.550.650,- (85,51%) dan kegiatan Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang didukung dengan dana sebesar Rp.748.464.000,- dan realisasi sebesar Rp.665.498.050,- (88,92%).

|  |  |
| --- | --- |
| **Sasaran 2** | Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat |

**Sasaran 2** yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator kinerja yaitu tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan target Level 2.

**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat” telah dilakukan penilaian tingkat maturitas/kematangan SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2**

**Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran** | **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| **2.** | Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Level 2 | Level 3 | 150 |

Hasil penilaian tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: LHE-200/PW03/3/2016 tanggal 20 Juni 2016 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **berkembang** (level 2) dengan nilai maturitas SPIP sebesar 2,838. Pada tahun 2017 hasil penilaian tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berada pada level **terdefenisi** (level 3) dengan nilai maturitas SPIP sebesar 3,25 namun belum di *Quality Assurance* (QA). Dari target level 2, maka persentase capaian kinerja sebesar 150%.

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 2 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **REALISASI** | | **% CAPAIAN** | |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 2.838 | 3 | 141,9 | 150 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 150% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diketahui bahwa capaian tahun 2017 telah mengalami peningkatan.

**Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun faktor keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi/unit organisasi.

Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten.

Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP dengan perekrutan staf yang kompeten dan memadai, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat/tools pengendalian intern.

Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/ pengetahuan pegawai tentang proses SPIP

Meningkatkan kesadaran manajemen di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai proses yang integral dari pelaksanaan kegiatan.

Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik.

Melakukan pembinaan secara intensif dan mendorong SKPD dalam melaksanakan SPIP dilingkungan SKPD masing-masing.

Meningkatkan kerjasama dengan Pembina SPIP (BPKP).

Adanya kesadaran OPD untuk memperbaiki pengendalian internal pada masing-masing bagian.

**Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2**

Untuk mencapai sasaran 2 yaitu “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat”, pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan dukungan dana sebesar Rp.235.000.000- dan realisasi sebesar Rp.141.978.594,- (60,42%).

|  |  |
| --- | --- |
| **Sasaran 3** | Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat |

**Sasaran 3** yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu “Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pimpinan yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang  merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pemerintah daerah telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi Pemda yang berpredikat Zona Integritas untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan daerah. Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pembinaan kepada OPD.

**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator kinerja OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dengan capaian sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3**

**Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran** | **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** |
| 3. | Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat | OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM | 4 SKPD | 4 SKPD | 100 |

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk mencapai sasaran meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dengan target 4 (empat) OPD telah terealisir 4 (empat) OPD. Penilaian internal terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi wilayah bebas korupsi Tahun 2016 sebanyak 2 SKPD sesuai SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 700 – 879 – 2016 tentang Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMPPT) sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berintegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penilaian internal terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi wilayah bebas korupsi tahun 2017 sebanyak 2 SKPD sesuai SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 700 – 469 – 2017 tentang Penetapan RSUD Pariaman dan RSUD Solok sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berintegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dapat dikatakan sampai dengan tahun 2017 telah terealisai 4 SKPD yang dikembangkan menjadi perangkat daerah yang berintegritas menuju WBK/WBBM dengan target 4 SKPD sehingga capaiannya 100%.

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Terhadap indikator SKPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 3 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **REALISASI** | | **% CAPAIAN** | |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM | 2 | 4 | 100 | 100 |

Hasil capaian indikator kinerja tahun 2016 dan tahun 2017 sama yaitu sebesar 100%.

**Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

* + - 1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi
      2. Pembinaan yang berkelanjutan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar terhadap SKPD yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai WBK.
      3. Partisipasi dari seluruh pegawai yang ada pada OPD yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai WBK.
      4. Mendokumentasikan seluruh dokumen yang diperlukan secara rapi dan terstruktur berdasarkan masing-masing komponen.
      5. Meningkatkan kesadaran dari seluruh pegawai terhadap budaya kerja dan pola pikir.
      6. Pembinaan pengawasan terhadap OPD Provinsi Sumatera Barat.
      7. Membuka Kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi.
      8. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dengan memberikan sosialisasi/ workshop kepada seluruh SKPD Provinsi Sumbar.
      9. Melakukan pembinaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi.

**Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3**

Untuk mencapai sasaran 3 yaitu “Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan pembinaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dengan dukungan dana sebesar Rp.120.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.111.047.550,- (92,54%).

|  |  |
| --- | --- |
| **Sasaran 4** | Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat |

**Sasaran 4** yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan target Level 2.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1633/K/Jf/2011, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional APIP pada tanggal 13 Mei 2015 di BPKP Pusat agar dalam 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2019) 85% APIP berada pada Level 3.

**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Pencapaian sasaran meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan target Level 2 dengan capaian sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4**

**Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran** | **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **%Capaian** |
| **4.** | Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat | Level 2 | Level 3 DC | 150% |

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk mencapai sasaran meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan target Level 2 telah tercapai. Sesuai dengan Surat BPKP Nomor: S-2598/D3/01/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Akselerasi Peningkatan Kapabilitas APIP Provinsi diketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat berada pada Level 3 Dengan Catatan sehingga capaian tahun 2017 yaitu 150%.

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 4 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **REALISASI** | | **% CAPAIAN** | |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat | - | 3 DC | - | 150 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah terpenuhi 150%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ditetapkan.

**Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen dan dukungan pimpinan dalam peningkatan kapabilitas APIP.
2. Adanya Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat No: 700/01/SK-INSP/2017 tentang Satuan Tugas Peningkatan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, yang bekerja untuk menginventarisir dan mengakomodir semua komponen/elemen pendukung peningkatan leveling tersebut.
3. Mengoptimalkan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebagai salah satu sarana efektif meningkatkan kapabilitas APIP.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP melalui diklat-diklat.
5. Pendampingan dan pembekalan yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumbar untuk memfasilitasi kelancaran kinerja satuan tugas peningkatan level kapabilitas APIP.
6. Peningkatan pemakaian sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas APIP .
7. Menerapkan pemakaian sistem aplikasi berbasis IT untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan secara optimal.
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas auditor yang didasarkan pada jumlah beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

**Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 4**

Untuk mencapai sasaran 4, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran Belanja Langsung Rp.9.620.461.062 dengan realisasi Rp.8.468.756.457 dengan capaian 88,03%.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sasaran 5** | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi |

**Sasaran 5** yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja yaitu :

1. Nilai evalusi Akuntabilitas Kinerja

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Pada Tahun 2017 Penilaian Evaluasi LKj IP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara simultan dengan penilaian evaluasi LKj IP Pemrov Sumatera Barat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetapi dengan hasilnya BB.

Dasar perhitungan:

Realisasi = Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah

% Capaian = Realisasi x 100%

Target

= BB x 100%

BB

= 100%

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 5 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **REALISASI** | | **% CAPAIAN** | |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | - | 100% | - | 100 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah terpenuhi 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ditetapkan.

**Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti rekomendasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang benar sesuai dengan cascading.

Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi.

1. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan

**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Indikator Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dengan target 95% telah tercapai dengan realisasi 95,97% dan capaian 101,02%.

Dasar perhitungan:

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**

**Sasaran 5 Tahun 2016-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **REALISASI** | | **% CAPAIAN** | |
| **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | - | 95,97% | - | 101,02 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah terpenuhi 101,02%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ditetapkan.

**Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Kontrol pimpinan selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengawal dan mengawasi Penggunaan Anggaran.
2. Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan pengawalan laporan keuangan terhadap capaian perbulan pada bagian keuangan.

**Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 5**

Untuk mencapai sasaran 5, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran Belanja Langsung Rp.9.620.461.062 dengan realisasi Rp.8.468.756.457 dengan capaian 88,03%.

* 1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan **Visi** yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**“MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI”.**

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (costumer satisfaction).

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dilihat dari Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, adanya hubungan keselarasan dari Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu ”Menjadi Pengawas yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat”.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah ”Membina dan Mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas provinsi”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan SKPD sebagai berikut:

* + - * 1. KEGIATAN UTAMA
  1. Kegiatan Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
  2. Kegiatan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
  3. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah
     + - 1. KEGIATAN PENUNJANG

Dalam melaksanakan kegiatan utama, dilakukan beberapa kegiatan penunjang antara lain:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern.
2. Pembangunan Zona Integritas.
3. Pengendalian Gratifikasi.
4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
5. Penguatan Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP).
6. Rapat koordinasi pengawasan.
7. Fasilitas, sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
8. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan.
9. Memberikan pelayanan (*Quality Assurance*) kepada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara sinergis serta arahan/bimbingan dan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
10. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategi di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Isu-Isu Strategis**

Salah satu dasar penyusunan Renja OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum sepenuhnya memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan.
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

**Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Pada Tahun 2017 tingkat capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 100%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengunduran jadwal disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya *overlapping* pemeriksaan dengan BPK, Itjen Kemendagri dan Itjen Kementerian lainnya.
2. Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kurangnya kesadaran auditan untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan hasil pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan harus ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) pengawasan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai disamping kurangnya anggaran/dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/kusus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu diikutsertakan pelatihan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya

1. Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi).

**Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamais Pada Tahun 2025” sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu ”Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”. Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 5 misi:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 adalah:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfataan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada misi kedua yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Misi ke dua Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah: Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

* + - 1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
      2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan OPD Inspektorat Daerah Provinsi diatas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan
2. Objek Pemeriksaan yang belum kooperatif dan kurang respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
3. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 dan Pergub Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat
4. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang professional belum optimal
5. Sarana dan Prasarana belum representative (antara lain kendaraan dinas opasional belum cukup)
6. Peluang Pengembangan pelayanan
   * + 1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
       2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
       3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
   1. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Reviu terhadap Rancangan Awal OPD sebagai berikut:

**Tabel T-C.31**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018**

**Provinsi Sumatera Barat**

**Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rancangan Awal RKPD 2018** | | | | | **Hasil Analisa Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp.000)** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Kebutuhan Dana (Rp.000)** |
|  |  |  |  |  | **9.211** |  |  |  |  | **9.211** |  |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Padang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | 1.851 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Padang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | 1.861 |  |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Padang | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 242 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Padang | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 342 |  |
|  | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan public (zona hijau) | Zona Hijau |  |  | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan public (zona hijau) | Zona Hijau |  |  |
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Padang | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas | 100 % | 74 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Padang | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas | 100 % | 74 |  |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Padang | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat | 15 JPL/orang/  tahun | 93 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Padang | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat | 15 JPL/orang/  tahun | 93 |  |
|  | Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) | Level 2 |  |  | Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) | Level 2 |  |  |
| 5 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Padang | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja SKPD | 100 % | 167 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Padang | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja SKPD | 100 % | 167 |  |
|  | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD | Predikat BB |  |  | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD | Predikat BB |  |  |
|  | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | 100% |  |  | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | 100 % |  |  |
|  | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD | 100 % |  |  | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD | 100 % |  |  |
|  | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD | 100 % |  |  | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD | 100 % |  |  |
| 6 | Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum | Padang | Penurunan nilai kerugian daerah | 8,5 % | 6.797 | Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum | Padang | Penurunan Nilai Kerugian Daerah |  | 7.642 |  |
|  | Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti | 70 % |  |  | Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti | 70 % |  |  |
|  | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pegawasan Intern Pemerintah) | Level 2 |  |  | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pegawasan Intern Pemerintah) | Level 2 |  |  |
|  |  |  | Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | 3 Perangkat Daerah |  |  |  | Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | 4 Perangkat Daerah |  |  |
| 7 | Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat | Padang | Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani | 100 % | 226 | Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat | Padang | Pengaduan masyarakat ditangani | 100 % | 200 |  |

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai Program dan Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah** |

* 1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup “*watchdog*” tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (resources) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam arah kebijakan bidang aparatur negara, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (*good* *governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128). Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dan *Early Warning System*, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

* 1. **Tujuan dan Sasaran Renja PD 2019**

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

* + - 1. **Tujuan**

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

* + - 1. **Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan

Indikator sasaran:

* Persentase OPD yang bebas dari Penyimpangan material
* Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset
* Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti
* Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar.
* Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas

1. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat

Indikator sasaran:

* Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

Indikator sasaran:

* OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM

1. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat

Indikator sasaran:

* Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Indikator sasaran:

* Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja
* Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan

Sasaran yang akan dicapai tahun 2019 sesuai Renstra Inspektorat Provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan | 1. Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material 2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset 3. Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti 4. Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani dalam waktu sesuai standar 5. Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas | 94%  94%  70%  100%  37 OPD |
| 2. | Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat. | * Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Level 3 |
| 3. | Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat | * OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM | 6 OPD |
| 4. | Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat | * Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat | Level 3 |
| 5. | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | BB  95% |

* 1. **Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah ”Membina dan Mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas provinsi”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun disebut Renja.

Rencana Program/Kegiatan Inspektorat Provinsi Tahun 2019 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | | | **PAGU** |
|
| **I.** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | | **2.002.818.862** |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 23.152.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 334.800.000 |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 6.500.000 |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 69.358.600 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 64.383.000 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 5.650.000 |
| 7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | 34.200.000 |
| 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah | | 833.375.000 |
| 9 | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur | | 18.020.000 |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | 56.160.000 |
| 11 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor | | 557.220.262 |
| **II.** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | | **363.850.000** |
| 1 | Pengadaan Meubeleur | | 33.800.000 |
| 2 | Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi | | 4.500.000 |
| 3 | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor |  | 34.950.000 |
| 4 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi |  | 15.000.000 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi | | 4.600.000 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | 27.250.000 |
| 7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | 100.400.000 |
| 8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 15.650.000 |
| 9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | | 27.700.000 |
| 10 | Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan | | 100.000.000 |
| **III.** | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | | **67.500.000** |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | 67.500.000 |
| **IV.** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | | | **93.820.000** |
| 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 93.820.000 |
| **V.** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | | | **154.698.000** |
| 1 | Penatausahaan Keuangan OPD | | 139.698.000 |
| 2 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | | 15.000.000 |
| **VI.** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET** | | | **28.194.000** |
| 1 | Pengelolaan pengawasan dan Pengendalian Aset OPD | | 28.194.000 |
| **VII.** | **PROGRAM IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT** | | | **140.994.400** |
| 1 | Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat | | 140.994.400 |
| **VIII.** | **PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM** | | | **7.114.124.738** |
| 1 | Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi | | 4.175.249.738 |
| 2 | Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | | 692.130.000 |
| 3 | Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan | | 661.973.000 |
| 4 | Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan | | 496.000.000 |
| 5 | Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | | 100.000.000 |
| 6 | Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi | | 195.980.000 |
| 7 | Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) | | 92.628.000 |
| 8 | Pengendalian Gratifikasi | | 60.000.000 |
| 9 | Pengelolaan LHKPN dan LHKASN | | 100.000.000 |
| 10 | Pembinaan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | | 100.000.000 |
| 11 | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar | | 440.164.000 |
| **JUMLAH** | | | | **9.966.000.000** |

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total pagu dana dan pagu indikatif Tabel T-C.33 terlampir.

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah** |

Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table T-C.27 sebagaimana terlampir.

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Penutup** |

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

* + - 1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas
      2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
      3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPK,
      4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan

Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap SKPD

Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean* *Government*) di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan.

**INSPEKTUR,**

**Drs. H. MARDI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601211 198203 1 007

**INSPEKTUR PROVINSI**